

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) OPD Dinas Kesehatan merupakan kewajiban Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renja disusun sebagai pegangan bagi setiap OPD dalam mengelola Keuangan guna melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Bontang Tahun 2025. Dengan tersusunnya Renja OPD Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025, maka segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2025 difokuskan pada Renja tersebut.

Kami menyadari Renja ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu dalam menyempurnakan Renja ini diharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Mudah-mudahan Renja ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Bontang.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Renja ini. Dan semua pihak yang membuat dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terimakasih.

Bontang, Juli 2024

Kepala Dinas,



Santiar M., S.Sos, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19670715 199001 1 001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU	8
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tahun Lalu	8
II.2. Analis Kinerja Pelayanan Dinas	30
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	34
II.3.1. Analisa SWOT	35
II.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah ...	36
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
II.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	46
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	46
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	48
III.3. Program dan Kegiatan	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
BAB V PENUTUP	64
V.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian	65
V.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	66
V.3. Rencana Tindak Lanjut	67

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang

Penetapan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan periode 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai merupakan rencana pembangunan tahunan.

Sesuai dengan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Tujuan dan Sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun lima tahun (2021-2026).

Renstra tersebut menjadi pedoman Dinas Kesehatan dalam menyusun kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas pembangunan kesehatan beserta pendanaannya untuk tahun berikutnya.

Dalam proses penyusunan Renja, Dinas Kesehatan telah menyusun Rancangan Renja yang telah diselaraskan dengan Renstra Dinas Kesehatan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Dokumen tersebut selanjutnya disempurnakan berdasarkan hasil masukan pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bontang Tahun 2024 dan menjadi Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah-atas (*Bottom Up Planning*) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi.

Untuk memastikan adanya penyelarasan dengan dokumen perencanaan lain, maka pembahasan terhadap dokumen tersebut dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan Kota Bontang. Pembahasannya mencakup :

- Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang tingkat OPD dan Kecamatan;
- Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang;
- Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD terkait di Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang;
- Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Kesehatan Kota Bontang.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021-2026, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Dengan demikian program/kegiatan diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Renstra Dinas Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- k. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- l. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI 2022-2024;

- n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Walikota Bontang Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan Renstra yang memuat perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bontang yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pembangunan Kesehatan Kota Bontang sesuai dengan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.
2. Sebagai Pedoman Operasional program dan kegiatan pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bontang pada tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

I.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD

I.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

III.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA OPD.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rangkaian program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan serta anggaran

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting dan kaidah pelaksanaan yang perlu mendapatkan perhatian pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Secara umum, tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Bontang adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, dengan fungsi utama adalah perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagaimana digambarkan pada tabel II.1

Anggaran Dinas Kesehatan Adapun Realisasi dari Total Belanja Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 adalah Belanja Operasi yang merupakan belanja Pegawai sebesar Rp. 59.168.365.321,-, Belanja barang dan jasa Rp. 73.823.772.433,- Belanja Hibah Rp. 300.000.000,- dan atau total belanja operasi dalam satu tahun sebesar Rp. 133.292.137.754,- (89,48%) dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 15.677.370.934,- (10,52 %).

Adapun usulan program/kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan Renstra pada tahun 2023 adalah 5 Program, 22 Kegiatan dan 93 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 148.969.508.688,- Anggaran tersebut dialokasikan sebagian besar untuk Kegiatan Program di Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan Kota Bontang. Selain itu alokasi tersebut juga dominan dipergunakan untuk premi jaminan pelayanan kesehatan (Jamkesda dan PBI Kota Bontang), jasa administrasi perkantoran/pelayanan kesehatan untuk tenaga non PNS dan pokok dalam bidang kesehatan. Untuk capaian realisasi kinerja program/kegiatan OPD Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dan perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel II.2

Diproyeksikan bahwa pada tahun 2024, semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai semua.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, maka dengan ini

dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia bidang kesehatan meski secara kuantitas telah tercukupi sesuai standar (jumlah, jenis tenaga), namun secara kualitas (kompetensi) masih perlu ditingkatkan keterampilannya dalam hal terkait dengan pelayanan, karena hal ini akan berperan dalam pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan secara menyeluruh serta diperlukan pengembangan kompetensi SDM baik dibidang teknis yang di butuhkan seperti Arsiparis, Administrasi Kesehatan dan jabatan fungsional tertentu.

Disamping itu adanya kebijakan pemerintah pusat terkait transformasi Kesehatan dalam hal ini tranformasi layanan primer yang sejalan dengan program prioritas walikota dalam hal peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan diharapkan pada tahun 2024 terealisasi pembangunan Puskesmas Pembantu di wilayah Bontang Kuala dan Guntung. Dan dengan adanya pengembangan tersebut akan berdampak pada kebutuhan SDM terutama tenaga fungsional kesehatan seperti tenaga medis dan paramedis yang akan mendukung pelaksanaan program dilapangan.

Selain itu kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan belum optimal, karena itu diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan (Kerangka Acuan Kegiatan) yang baik sehingga program/kegiatan terjadwal sesuai dengan tahapan-tahapannya agar dapat berjalan sesuai dengan capaian kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Faktor masyarakat

Pembangunan kesehatan jangan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal ikut berpartisipasi dalam program kesehatan, pemantauan, dan edukasi kesehatan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan kelurahan. Disamping itu beberapa kendala dalam pendataan di masyarakat karena mobilitas penduduk yang cukup tinggi sehingga menyulitkan dalam penetapan data sasaran untuk rencana intervensi kegiatan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Masih adanya puskesmas yang belum memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang terbatas Disamping itu masih terbatasnya sarana tertentu terutama dalam menjangkau pelayanan di daerah perifer dalam menunjang pelayanan kesehatan dan sebagai Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seperti Puskesmas Bontang Lestari sebagai pusat pelayanan masyarakat terutama di wilayah pesisir, oleh karena itu sesuai dengan program prioritas Wali kota Bontang yaitu peningkatan layanan di wilayah perifer maka perlu dukungan sarana dan prasarana diantaranya sarana transportasi darat maupun laut yang akan digunakan dalam pelayanan kesehatan.

Prasarana kefarmasian juga perlu perhatian khusus dimana kebutuhan tersebut merupakan titik riskan dalam pelayanan kesehatan kuratif untuk menunjang peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bontang.

d. Faktor Lingkungan

Kebijakan Walikota saat itu untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tertunda bahkan tidak dilaksanakan, disamping itu kebijakan terkait dinamika regulasi pengelolaan keuangan seperti pengaturan terkait dengan bantuan sosial dan hibah yang berefek pada pergeseran bantuan tersebut menjadi bagian dari tugas pokok dari fungsi Dinas Kesehatan.

Dari beberapa identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal yang dilakukan secara sistematis baik secara internal organisasi maupun yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai selama ini dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder terkait baik intra dan sektor terkait serta pelibatan peran serta organisasi lain seperti Forum Kota Sehat (Forkohat), PKK, KPAD, LSM, CSR dan BPJS Kesehatan yang bergerak di

bidang kesehatan dan lain-lain sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun 2021-2026, maka dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan yang sejalan dengan program transformasi kesehatan yang saat ini diupayakan oleh Kementerian Kesehatan untuk kedepan diambil langkah-langkah strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kesehatan Kota Bontang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Transformasi Kesehatan yang mencakup 6 pilar :
 - a. **Transformasi Layanan Primer**; Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer, dengan melakukan revitalisasi network dan standarisasi layanan di Puskesmas, posyandu, dan kunjungan rumah serta pemenuhan sarana Puskesmas Pembantu (pembangunan Pusban Bontang Kuala dan Pusban Guntung) untuk kemudahan keterjangkauan layanan masyarakat;
 - b. **Transformasi Layanan Rujukan** berupa penambahan sarana gedung untuk pemenuhan ketersediaan tempat tidur rawat inap, pengembangan prasarana dengan penambahan alat kemoterapi dan peningkatan kapasitas SDM RSUD Taman Husada Bontang sebagai RS rujukan pemerintah yang terstandar.
 - c. **Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan**, pemenuhan ketersediaan obat-obatan, BMHP, Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya, mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan, serta melindungi masyarakat dari bahan berbahaya serta memperkuat ketahanan tanggap darurat dan surveilans dengan melakukan jejaring;
 - d. **Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan**, pemerintah melalui intervensi Dinas Kesehatan memastikan pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat kota Bontang yang tidak memiliki pembiayaan mandiri tercover JKN PBI, juga dalam hal ini pembiayaan tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap penurunan kemiskinan ekstrim di Kota Bontang;
 - e. **Transformasi SDM Kesehatan**, memastikan pemerataan dan pemenuhan distribusi tenaga kesehatan, penjangkauan pelayanan

ke wilayah atau pulau-pulau pesisir dengan peningkatan volume kunjungan pelayanan;

f. Transformasi Teknologi Kesehatan, memanfaatkan dengan baik perkembangan teknologi digital, agar proses digitalisasi di sekitar kesehatan dapat menjadi lebih bertumbuh dengan pengembangan E-MR (Elektronik Medical Record) terintegrasi dengan seluruh faskes swasta sehingga rekapitulasi data kesehatan cepat diakses. Integrasi sistem SikDa perlu melibatkan faskes swasta dari segi pembiayaan karena kemampuan pembiayaan APBD terbatas.

2. Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan secara terus menerus untuk perlindungan terhadap masyarakat meliputi anak sekolah, dan kelompok penduduk yang rawan seperti bayi, balita, dan ibu hamil dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai target Nasional (RENSTRA dan SDG's);
3. Peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan tambahan bagi semua ibu hamil, balita yang tergolong rawan, atau kelompok miskin. Penurunan stunting kepada anak yang memiliki indikator stunting harus benar-benar mendapatkan support dari pemerintah (Dinkes), perbaikan data (pemetaan sasaran, lokus) untuk dicross cek/perbaikan berkala;
4. Menerapkan regulasi perizinan kesehatan dan sistem kesehatan daerah.
5. Peningkatan UPTD Labkesda (Akreditasi) menuju Labkesda BSL-2. Mengembangkan pelayanan laboratorium kearah pemeriksaan lingkungan, makanan dan minuman dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat.
6. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Pendekatan Keluarga dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat dengan 10 Indikator PHBS, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum lainnya dengan survei STBM.
7. Mengembangkan regulasi, standar dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat.

Tabel II.2
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)		RKPD (tabel bantu)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESERAHAN							110.617.895.088		148.968.906.688		13.317.992.962		32.493.228.167		27.745.271.734		53.636.576.803		127.193.067.696		
PROGRAM PENJALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Pertemuan pemenuhan layanan pemenuhan urusan pemerintahan daerah (DINKES)	100	persen	295.114.271.902	RN/A	180	persen	72.904.855.088	75.054.176.958		11.994.495.321										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8	dokumen		RN/A	8	dokumen	155.000.000	110.040.000	-			21.970.000		14.070.000		20.587.500		96.627.500		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	692.120.000		2	dokumen	3.430.000	30.000.000	1	dokumen		9.288.750			1	1.268.750		1.240.750	Dinas Kesehatan	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS SKPD	Jumlah Dokumen RKAS SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS SKPD	2	dokumen	7.000.000	RN/A	2	dokumen	80.000.000	19.102.500							1	9.045.000		9.045.000	Dinas Kesehatan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1	dokumen	53.240.000		1	dokumen	1.010.000	50.000.000	1	laporan		8.040.000	0,3	10.050.000	0,4	1.248.750		19.336.750	Dinas Kesehatan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	26.020.000		-	4	laporan	25.000.000				13.930.000	1	4.020.000	1	9.045.000		26.995.000	Dinas Kesehatan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan				RN/A	8	laporan	56.576.117.228	55.256.236.790		9.964.576.603		13.668.691.414		11.754.264.635		12.570.336.568		49.947.889.310		
Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	608	orang	31.000.000		276	orang	44.124.068.605	56.506.117.236	608	orang/bulan		9.954.576.693	608	12.500.956.508	608	12.500.956.508		49.938.489.310	Dinas Kesehatan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	186.548.000		1	laporan	11.460.000	25.000.000	1	laporan		13.308.750			1	1.340.000		1.340.000	Dinas Kesehatan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	laporan	10.000.000	RN/A	2	laporan	25.000.000	10.537.500	2	laporan					2	4.020.000		4.020.000	Dinas Kesehatan	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	laporan	12.500.000		-	1	dokumen	20.000.000				9.288.750			1	4.020.000		4.020.000	Dinas Kesehatan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD				RN/A	1	laporan	30.000.000	28.757.250		-		1.005.000		24.737.250		3.015.000		28.757.250		
Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	1	dokumen	30.000.000	RN/A	1	laporan	30.000.000	28.757.250	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		1.005.000	0,3	24.737.250	0,4	3.015.000		28.757.250	Dinas Kesehatan	
Administrasi Pendapatan Daerah (Kewenangan Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Penghasilan Retribusi Daerah				RN/A	12	laporan	15.000.000	24.120.000		-		360.000				1.920.000		2.280.000		
Pelaporan Penghasilan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penghasilan Retribusi Daerah	1	dokumen	15.000.000	RN/A	1	dokumen	15.000.000	24.120.000				360.000			0,5	1.920.000		2.280.000	Dinas Kesehatan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian				RN/A	3	laporan	750.000.000	1.208.207.160		-		840.000		139.964.000		949.877.440		1.000.691.440		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	dokumen	20.000.000	RN/A	1	dokumen	200.000.000	14.740.000				840.000		0,5	4.014.000		4.854.000		RN/A	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	orang	250.000.000	RN/A	20	orang	500.000.000	1.181.831.000	20	orang				5	116.750.000	15	945.477.440		1.062.227.440	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	orang	100.000.000	RN/A	100	orang	50.000.000	71.806.160						35	19.200.000	30	4.400.000		23.600.000	Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum				RN/A	3	laporan	1.845.000.000	6.164.916.930		192.221.891		373.730.046		879.573.222		4.567.707.570		5.973.232.728		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25	paket	132.100.000		25	paket	4.455.540	25.000.000	25	paket		8.382.054			25	8.145.000		8.145.000	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30	paket	266.209.000		35	paket	1.426.166.325	150.000.000	30	paket		3.046.218.156	5	34.120.000	12	167.995.120	21	2.768.665.636	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	68	paket	300.000.000		58	paket	257.577.815	290.000.000	58	paket		106.422.203	2	1.040.000	21	67.430.800	35	103.503.000	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	Jumlah Paket barang cetak dan Pengoperasian yang disediakan	25	paket	202.620.000		20	paket	145.932.311	200.000.000	25	paket		169.803.830	3	10.849.995	9	62.485.509	13	87.727.210	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan yang disediakan	50	paket	146.541.000		-	25	10.000.000												Dinas Kesehatan	
Fasilitas Kurungan Tamsi	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tamsi	10	laporan	30.000.000	RN/A	10	laporan	50.000.000	49.600.000	10	laporan		2.467.000		4	24.276.000	5	19.204.000		45.947.000	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	laporan	8.462.005.000		55	laporan	813.538.413	1.000.000.000	60	laporan		2.163.331.300	5	283.253.051	18	545.886.709	28	1.148.482.710	Dinas Kesehatan	
Pertanggungjawaban Asap Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Asap Dinas pada SKPD	1	dokumen	100.000.000	RN/A	1	dokumen	100.000.000	217.290.387				42.000.000			0,5	187.775.000		209.775.000	Dinas Kesehatan	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			RN/A	1	dokumen	100.000.000	291.609.900						0,5	3.350.000	0,5	272.350.000		275.700.000	Dinas Kesehatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah					191.980.500	1	laporan	100.000.000		-						168.000.000		168.000.000		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2025 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)				RKPD (tabel bantu)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)				Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3	4	5				6				7				8				9				10=6+9				11=10/5x100%						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket	146.410.000	2	paket	191.086.500	1	Paket	100.000.000	1	Rancangan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	188.447.808				1	168.000.000	168.000.000		359.086.500					Dinas Kesehatan						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terealisasi sumber daya air, listrik, komunikasi dan Timpa Kontrol Daerah					HN/A	12 bulan	11.623.737.851		10.271.515.000	1.555.341.137		2.497.414.397			2.888.611.299	6.941.306.833															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	7.320.200		HN/A	1 Laporan	5.500.000	1	laporan	2.250.000		0,5		134.000	0,5	172.500	306.500		HN/A					Dinas Kesehatan							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	439.210.000	12	bulan	269.633.016	12	Laporan	400.000.000	12	laporan	374.700.000	1	62.219.136	2	65.021.270	4	74.228.815	5	94.919.144	296.386.371	566.021.387		Dinas Kesehatan							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	bulan	64.995.782.162	12	bulan	9.315.664.180	12	bulan	11.218.237.851	12	bulan	9.894.565.000	1	1.493.122.001	4	2.432.259.121	1	1.962.839.867	6	2.793.519.655	8.681.740.644	17.997.404.824		Dinas Kesehatan							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uang Pemeliharaan Daerah	Aset Barang Milik Daerah terpelihara			3.588.424.818		HN/A	12 bulan	1.770.000.000		1.741.896.020	252.395.600		173.025.320		296.511.540		942.190.903	1.664.083.367														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajaknya	8	unit	299.300.000	6	unit	1.125.105.325	7	Unit	300.000.000	7	unit	213.314.100	1	37.856.000	1	47.936.870	2	39.593.850	3	60.429.149	185.809.868	1.310.915.244		Dinas Kesehatan							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Partisipasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Partisipasinya			1.331.000.000		HN/A	50 Unit	1.000.000.000	50	unit	1.028.252.500	17	214.505.600		125.088.450	16	207.086.464		443.478.886	21	590.159.400		HN/A	Dinas Kesehatan								
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diperiksa	30	unit	13.310.000		HN/A	30 Paket	10.000.000	30	Rancangan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)											HN/A				Dinas Kesehatan							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa	50	unit	171.515.315	33	unit	65.623.790	10	Unit	130.000.000	50	unit	80.440.000			12	22.752.788	38	58.074.200		80.826.960	146.450.778			Dinas Kesehatan							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	1	unit	183.695.503	4	unit	3.359.992.078	1	Unit	330.000.000	1	unit	409.849.420			0,5	27.078.450	0,5	380.208.668		407.287.118	3.761.279.191			Dinas Kesehatan							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi	10	ratio	441.807.995.940		HN/A	11 ratio	48.300.759.587		70.414.103.412	1.395.490.811																					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RHP Sesuai standar			28.012.392.987		HN/A	100 persen	5.840.000.000		14.191.926.477	-		-		1.694.813.172		9.712.231.358		11.407.044.530													
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Ditolak Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	1	unit	200.000.000	15	unit	1.195.727.800	2	Unit	1.140.000.000	2	unit	680.720.960			2	632.573.190	2	38.105.000		670.678.150	1.866.405.950			Dinas Kesehatan							
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat kesehatan yang Telah Ditolak Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas kesehatan Lainnya	1	unit	150.000.000		HN/A	1 Unit	100.000.000	1	unit	1.160.633.140					1	1.157.844.350		1.157.844.350		HN/A				Dinas Kesehatan							
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Disediakan			300.000.000	15	unit	502.801.560	3	Unit	300.000.000	1	unit	680.790.000			1	619.597.225		619.597.225		1.122.398.795				Dinas Kesehatan							
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Disediakan	95	unit	585.840.000	3	tahun	173.124.095	80	Unit	300.000.000	80	unit	522.820.339			5	37.024.000	75	425.923.875	80	462.947.875	634.071.970			Dinas Kesehatan							
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Disediakan	414	jenis	1.200.000.000.000	208	jenis	5.092.410.068	240	jenis	1.500.000.000	240	jenis	3.949.540.809			39	634.876.423	201	2.900.557.040	240	3.636.433.462	8.827.843.530			Dinas Kesehatan							
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	345	paket	3.061.300.000	283	jenis	1.637.094.700	297	Paket	1.000.000.000	297	paket	1.702.808.650				297	1.090.340.330	297	1.090.340.330	2.927.436.030				Dinas Kesehatan							
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	395	paket	2.196.150.000	279	jenis	2.446.385.424	310	Paket	1.000.000.000	300	paket	5.078.669.880				18	390.339.600	185	3.218.846.202	203	3.609.185.802	6.055.681.228			Dinas Kesehatan						
																		#####	1.467.454.078													
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Ditolak Pemeliharaan	8	Rhp	146.410.000		HN/A	8 RHP	100.000.000	8												HN/A					Dinas Kesehatan						
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Ditolak Pemeliharaan	8	Rhp	133.100.000		HN/A	8 RHP	100.000.000	8	Rancangan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)											HN/A					Dinas Kesehatan						
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	425	unit	489.210.000	300	jenis	250.240.307	150	Unit	300.000.000	350	unit	418.142.799				180	261.017.336	180	261.017.336	511.257.843				Dinas Kesehatan							

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)		RKPD (tabel bantu)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBOP 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										I		II		III		IV															
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP Rujukan Tingkat Derajat Kabupaten/Kota	Angka kelahiran TB				4N/A	91 orang	41.960.759.537		95.542.403.786		1.383.690.811		13.660.604.637		10.331.038.618		19.375.907.543		44.761.201.609		4N/A		11=10/5x100%								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8359	orang	113.100.000	8428	orang	183.172.380	8400	orang	110.000.000	3.400	orang	104.942.460	347		4.586.000	322	11.121.000	452	28.482.800	600	40.761.400	1.721	84.921.200	246.093.760		Dinas Kesehatan				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3431	orang	113.100.000	3340	orang	67.850.000	3200	orang	110.000.000	3.200	orang	114.523.995	707		686		753		864	83.939.100	3.040	83.939.100	151.789.100		Dinas Kesehatan					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8179	orang	113.100.000	3000	orang	75.680.000	3200	orang	110.000.000	3.200	orang	88.851.670	580		2.760.000	524		753	56.636.500	913	24.202.000	2.770	83.598.500	158.228.500		Dinas Kesehatan				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16335	orang	113.100.000	10990	orang	70.191.220	12000	orang	110.000.000	15.000	orang	109.920.000	1.881		12.400.000	2.868	12.960.000	4.115	39.221.000	3.146	32.773.000	12.040	97.354.000	167.885.220		Dinas Kesehatan				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19541	orang	113.100.000	17830	orang	96.285.060	27000	orang	110.000.000	27.000	orang	54.289.400	-		628.000	-		4.500.000	14.373	39.528.400	14.373	44.567.400	140.842.400		Dinas Kesehatan					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129403	orang	113.100.000	55090	orang	135.117.030	125000	orang	110.000.000	129.403	orang	98.779.027	9.586		8.400	9.651.948	5.180	700.000	56.987	59.037.804	76.123	69.189.762	188.327.352		Dinas Kesehatan					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10111	orang	113.100.000	9000	orang	45.090.800	8700	orang	110.000.000	10.111	orang	109.988.300	3.458				1.847		2.002	78.954.000	1.810	21.134.300	9.126	100.088.300	145.179.100		Dinas Kesehatan			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12877	orang	113.100.000	4913	orang	58.120.000	12500	orang	110.000.000	12.877	orang	289.865.480	1.422			7.350.000	761		753	88.471.566	3.043	143.072.138	5.977	238.865.704	297.213.704		Dinas Kesehatan			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4503	orang	113.100.000	2540	orang	14.842.300	4000	orang	110.000.000	4.503	orang	128.475.000	838				426		426	53.476.000	1.431	65.587.443	3.189	119.063.441	133.905.941		Dinas Kesehatan			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	287	orang	113.100.000	184	orang	2.325.000	300	orang	110.000.000	207	orang	98.115.760	102				47		20	11.864.200	23	20.995.900	190	32.260.100	34.885.100		Dinas Kesehatan			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tuberkulosis	Jumlah Orang Terganggu Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3959	orang	113.100.000	2880	orang	64.853.000	1900	orang	110.000.000	3.590	orang	310.143.537	1.183			906		31.191.000	1.236	6.262.080	941	229.371.960	4.275	266.825.040	331.478.860		Dinas Kesehatan			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terganggu Tuberkulosis HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3351	orang	113.100.000	5498	orang	124.917.336	4800	orang	110.000.000	8.351	orang	110.072.944	1.029			1.906		28.650.000	1.406	1.340.000	1.092	12.491.600	6.433	42.401.600	177.428.766		Dinas Kesehatan			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kesehatan Luar Biasa (KL.B)	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kesehatan Luar Biasa (KL.B) Sesuai Standar	1	dokumen	113.100.000		4N/A		1	dokumen	110.000.000														4N/A		Dinas Kesehatan					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Produkta Terpapar Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan bagi Produkta Terpapar Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	dokumen	779.300.000		1	dokumen	2.139.362.025	1	dokumen	422.000.000									1	45.056.600		45.056.600	2.244.410.629		Dinas Kesehatan					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GIZ Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan GIZ Masyarakat	1	dokumen	113.100.000		1	dokumen	425.192.039	1	dokumen	380.000.000									0,25	20.390.000		0,25	35.972.864	0,25	261.047.703	1	320.527.869	756.730.539		Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	dokumen	113.100.000		1	dokumen	390.182.508	1	dokumen	100.000.000									0,5	15.840.000		0,5	48.899.881		64.309.881	354.482.381		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	dokumen	113.100.000		1	dokumen	343.380.247	1	dokumen	110.000.000									0,3	5.245.000		0,3	75.410.900		664.828.087	998.058.334		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	dokumen	113.100.000		1	dokumen	815.618.305	1	dokumen	100.000.000									0,5	18.990.876		0,5	65.747.000		84.677.876	460.311.779		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1	dokumen	242.000.000		1	dokumen	249.524.500	1	dokumen	25.000.000												31.396.000		31.396.000	280.920.000		Dinas Kesehatan			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Surveilans Kesehatan	1	dokumen	113.100.000		4N/A		1	dokumen	50.000.000										0,25	3.210.000		0,25	11.653.300		196.413.476	216.976.776		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	dokumen	700.000.000		1	dokumen	536.212.569	1	dokumen	500.000.000									0,6	90.050.600		0,6	511.051.000		601.701.600	1.137.914.469		Dinas Kesehatan		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	dokumen	899.390.000		1	dokumen	280.353.339	1	dokumen	250.000.000									0,3	89.287.054		0,3	212.200.490		624.278.920	876.769.366		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	13.779.000.000		1	dokumen	21.382.487.900	1	dokumen	25.000.000.000									0,3	11.416.466.900		0,3	6.341.768.180		5.539.266.900	23.257.501.900	44.678.989.800		Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	2.071.624.150		1	dokumen	1.266.433.813	1	dokumen	1.556.441.886									0,3	339.204.703		0,3	330.807.057		910.814.478	2.279.248.290		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	1.542.805.389		1	dokumen	1.230.080.800	1	dokumen	1.450.656.384									0,3	225.069.689		0,3	384.088.944		767.672.705	1.977.762.305		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	2.095.754.054		1	dokumen	1.240.116.344	1	dokumen	1.574.571.640									0,3	235.277.434		0,3	407.799.291		846.282.322	2.086.800.868		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	1.792.223.810		1	dokumen	1.029.531.913	1	dokumen	1.346.526.783									0,3	290.691.835		0,3	205.154.500		604.073.720	1.633.425.645		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Barat)	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	1.426.018.428		1	dokumen	883.707.688	1	dokumen	1.071.387.248									0,3	163.359.572		0,3	268.608.959		610.029.785	1.469.737.428		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	710.318.692		1	dokumen	389.779.245	1	dokumen	533.680.422									0,3	56.446.830		0,3	74.896.637		236.044.008	636.814.253		Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Klinik PHN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	1.506.015.018		1	dokumen	1.132.227.345	1	dokumen	1.131.491.824									0,3	126.483.226		0,3	225.173.563		551.817.277	1.704.944.822		Dinas Kesehatan		
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	dokumen	880.300.000		1	dokumen	446.370.062	1	dokumen	450.000.000									0,25	6.450.692		0,25	5.893.751		213.078.276	228.204.419	074.574.481		Dinas Kesehatan	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2022)				RKPD (tabel baru)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun 1/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
		K		Rp		K		Rp			K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K			Rp		K		Rp	
		5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34		
3	4	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasilitas) yang Melaksanakan Konsultasi Jarak Jauh untuk Penyediaan Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Masyarakat Akses Pelayanan kesehatan yang Berkeadilan	6	Rtp		100.000.000	1	unit		45.390.000	1	FKTP		50.000.000	3		3	FKTP		42.635.502							1		27.493.168		27.493.168		73.651.168	Dinas Kesehatan		
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan												50.000.000	1			Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																Dinas Kesehatan		
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	Bulan		4.400.000.000								40.000.000	12			Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																Dinas Kesehatan		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Bulan		1.064.800.000	12	Bulan		728.543.654	1	Dokumen		500.000.000	1			dokumen		3.041.053.829	0,25		27.150.825	0,25		59.565.065	0,25		218.499.143	0,25	1.496.499.269	1	1.801.834.301	2.530.479.955	Dinas Kesehatan	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Bulan		1.064.800.000	12	Bulan		728.579.120	1	Dokumen		500.000.000	1			dokumen		2.064.081.734	0,25		55.977.484	0,25		59.436.060	0,25		198.276.311	0,25	940.826.271	1	1.234.516.132	1.963.494.242	Dinas Kesehatan	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Bulan		1.064.800.000	12	Bulan		379.336.713	1	Dokumen		500.000.000	1			dokumen		3.100.816.017	0,25		28.890.190	0,25		71.834.168	0,25		166.559.852	0,25	1.874.869.369	1	2.141.952.370	2.515.519.083	Dinas Kesehatan	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Bulan		1.064.800.000	12	Bulan		733.185.182	1	Dokumen		500.000.000	1			dokumen		1.804.153.264	0,25		38.956.484	0,25		98.854.363	0,25		917.239.743	0,25	1.109.563.918	1	1.842.748.100		Dinas Kesehatan	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Barat)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Bulan		1.064.800.000	12	Bulan		828.995.320	1	Dokumen		500.000.000	1			dokumen		2.369.872.290	0,25		35.074.680	0,25		69.059.670	0,25		84.486.389	0,25	1.284.652.157	1	1.474.172.887	2.303.125.407	Dinas Kesehatan	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Bulan		1.064.800.000	12	Bulan		684.739.885	1	Dokumen		500.000.000	1			dokumen		2.746.446.973	0,25		39.970.000	0,25		56.068.875	0,25		105.791.856	0,25	1.997.772.242	1	2.189.622.967	2.884.342.852	Dinas Kesehatan	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya												500.000.000	10			Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																Dinas Kesehatan		
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Laboratorium Kesehatan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	12	Dokumen		665.300.000	12	Bulan		742.029.872	1	Dokumen		500.000.000	1			dokumen		2.030.454.684	0,25		59.721.115	0,25		64.898.377	0,25		208.466.203	0,25	1.574.814.435	1	1.907.800.132	2.650.250.004	Dinas Kesehatan	
Pelaksanaan Amdpro Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten Kota	8	Rtp		133.100.000								150.000.000	8			FKTP		563.001.060	8					8		242.502.336	8	215.114.430	8	481.446.760			Dinas Kesehatan	
Pelaksanaan Kesiapsiagaan Dis dan Bersin Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kesiapsiagaan Dis dan Bersin Wilayah	1	Dokumen		133.100.000	1	Dokumen		133.683.270	1	Dokumen		100.000.000	1			dokumen		132.422.651						0,3		9.050.000	0,3	5.360.000	0,4	52.579.820		68.969.626	200.473.096	Dinas Kesehatan
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 239) Terpadu, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Selain Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Dokumen		133.100.000	1	unit		280.130.080	1	unit		50.000.000	1			unit		143.775.180						0,3		7.300.000	0,3	7.260.000	0,4	110.442.664		125.002.664	325.135.664	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Puskesmas Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dilengkapi dan Diterima Melalui Puskesmas Keluarga Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas												50.000.000	1.000			Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																	Dinas Kesehatan	
Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penerbaca terintegrasi sistem informasi kesehatan terpadu/terintegrasi				803.892.000				342.062.200	30	persen		250.000.000																						
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	Dokumen		25.282.000	1	Dokumen		17.750.000	1	Dokumen		20.000.000	1			dokumen		21.452.270																
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8	Dokumen		250.000.000	8	Dokumen		120.969.050	8	Dokumen		220.000.000	8			dokumen		123.836.760																
Pengadaan Alat/Peralat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Peralat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang Peralatan	5	Dokumen		148.418.000	5	unit		213.747.150	5	unit		10.000.000	8			unit		75.866.462																
Pemertaban dan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar/ Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan Rujukan (FKT) Berkelas				519.615.000				775.411.364	130	persen		250.000.000						1.840.000																
Pengembangan dan Penguasaan sains Teknik Lantai Penguasaan Pembaruan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Berkelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Dikembangkan, Dikembangkan dan Dikembangkan Pembaruan	4	Dokumen		100.000.000	4	unit		142.880.168	4	unit		50.000.000	4			unit																		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang Dikeluarkan pengakuan indikator Nasional Mutu (NIM) Pelayanan kesehatan	8	Dokumen		200.000.000	8	unit		190.783.549	8	unit		100.000.000	8			unit		406.853.792																
Penyediaan Pemutihan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pemutihan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12	Bulan		219.615.000	12	Bulan		181.740.450	1	Dokumen		100.000.000	1			dokumen		49.765.865	0,25		1.840.000	0,25		12.350.000	0,25		9.195.000	0,25	9.192.000		33.177.000	234.923.450	Dinas Kesehatan	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemeriksaan tenaga kesehatan berkelas (Diklat)	100	persen		1.731.813.500								1.101.000.000																						
Pemberian dan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan tenaga kesehatan yang berkelas				86.402.500								25.000.000																						
Pembaruan dan Penguasaan Tenaga Kesehatan sains Teknik Lantai Penguasaan Pembaruan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembaruan dan Penguasaan Tenaga Kesehatan sains Teknik Lantai Penguasaan Pembaruan	100	orang		86.402.500								25.000.000	1																					
Pemenuhan Kebutuhan dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan pemenuhan kebutuhan SDRM berdasarkan Rencana Kebutuhan Pelayanan				148.418.000								76.000.000																						
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pelayanan)												50.000.000	600																					
Pembaruan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembaruan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	60	orang		148.418.000	76	orang		58.432.776	1	Dokumen		26.000.000	1			dokumen		199.965.900	0,25		8.006.860	0,25		15.811.000	0,25		40.117.019	0,25	114.352.341	1	178.287.222	236.719.996	Dinas Kesehatan	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan pemenuhan kebutuhan SDRM berdasarkan pengembangan kompetensi				1.350.800.000				7.313.619.712	130	persen		1.000.000.000																						

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)			RKPD (tabel bantu)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV														
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5			6			7			8								9			10=8÷9			11=10/3x100%						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di seakan					3.453.671.198	12 Bulan	4.400.000.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		3.152.400.000													3.453.671.198			Dinas Kesehatan			
Pemeriksaan Borang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Aksi Borang Milik Daerah terpelihara					#N/A	12 bulan	1.150.000.000				706.857.200																			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					47.159.060	0 Unit	100.000.000	0	unit		69.926.000													47.159.060			Dinas Kesehatan			
Pemeriksaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki					549.527.320	1 Unit	300.000.000	1	unit		297.000.000													549.527.320			Dinas Kesehatan			
Pemeriksaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi					197.064.850	1 Unit	150.000.000	1	unit		199.990.600													197.064.850			Dinas Kesehatan			
Pemeriksaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi					#N/A	1 Unit	600.000.000	1	unit		199.940.600													#N/A			Dinas Kesehatan			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	10	ratio			32.910.329.342		#N/A	11 ratio	68.000.000.000		68.000.000.000																			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase EKTJ Sesuai standar					#N/A	100 persen	68.000.000.000				68.000.000.000																			
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit					#N/A	12 Dokumen	68.000.000.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		68.000.000.000													#N/A			Dinas Kesehatan			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan bidang (RSUD)	180	persen			1.000.000		196.850.000	100 persen	200.000.000		292.846.000																			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM mendapatkan pengembangan kompetensi					196.850.000	100 persen	200.000.000				292.846.000																			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang Bina/kuasai Mutu dan Kompetensinya					196.850.000	80 Orang	200.000.000	80	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		292.846.000													196.850.000			Dinas Kesehatan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemangan 5 kluster keajaiban GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktifitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	33	persen			-	40 persen	10.000.000				25.390.000																			
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PHBS 5 Tahunan (Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum)					-	40 persen	10.000.000				25.390.000																			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					-	1 Dokumen	10.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		25.390.000													-			Dinas Kesehatan			

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)		RKPD (tabel bantu)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)		Realisasi Kinerja Pada Tridimensi								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
											K	Rp												
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	7	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10=6+9	11=10/5x100%
SEKRETARIAT DPRD																								
PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		100	person	283.085.063.124		46.980.380.124	45.317.976.538		47.406.078.000															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						309.170.909	142.272.500		138.128.000															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					218.028.469	1 Dokumen	50.000.000	26.226.000													218.028.469		Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD					375.000	1 Laporan	2.272.500	11.701.000													375.000		Sekretariat DPRD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					90.767.500	1 Laporan	90.000.000	100.201.000													90.767.500		Sekretariat DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.392.813.069	6.397.938.889		7.118.036.748															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					5.392.813.069	32 Orang/bulan	6.391.269.069	7.074.936.748													5.392.813.069		Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					-	1 Dokumen	2.272.500	11.701.000													-		Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					-	1 Laporan	2.272.500	11.701.000													-		Sekretariat DPRD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					-	1 Dokumen	2.122.800	11.701.000													-		Sekretariat DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.778.351.050	666.246.000		995.812.000															
Pengadaan Pakuan Dinas beserta Abstrak Kepegawaian	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Abstrak Kepegawaian					176.266.800	1 Paket	316.340.000	581.200.000													176.266.800		Sekretariat DPRD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					1.046.497.200	32 Orang	325.000.000	324.402.000													1.046.497.200		Sekretariat DPRD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					150.585.000	32 Orang	24.900.000	90.216.000													150.585.000		Sekretariat DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah						7.118.037.108	6.529.955.845		9.850.277.223															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					132.070.277	11 Paket	75.000.000	48.257.363													132.070.277		Sekretariat DPRD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1.553.637.122	3 Paket	887.622.190	879.474.918													1.553.637.122		Sekretariat DPRD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					158.687.375	3 Paket	25.000.000	241.674.750													158.687.375		Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					342.331.065	4 Paket	432.077.955	348.694.213													342.331.065		Sekretariat DPRD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					623.312.075	4 Paket	778.423.200	770.317.780													623.312.075		Sekretariat DPRD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)			RKPD (tabel bantu)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
3	4	5			6				7				8										9	10=6+9		11=10/3x100%			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					41.300.000		174.782.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		121.678.200													41.300.000			Sekretariat DPRD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.466.555.106	12 Laporan	3.186.190.500	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		3.441.100.000													3.466.555.106			Sekretariat DPRD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						699.971.652		200.000.000				224.151.655																	
Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan					600.801.442	20 Unit	250.000.000	10	Unit		198.421.300													600.801.442			Sekretariat DPRD	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					39.064.210	1 Unit	30.000.000	1	Unit		25.730.355													39.064.210			Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.788.417.569		8.758.000.000				9.179.159.750																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat Menyurat					19.500.000	12 Laporan	18.000.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		17.095.000													19.500.000			Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1.370.389.524	12 Laporan	1.500.000.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		1.740.000.000													1.370.389.524			Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Perawatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Perawatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan					103.208.580	4 Laporan	250.000.000	4	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		264.887.500													103.208.580			Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disediakan					6.291.319.089	12 Laporan	7.000.000.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		7.186.257.280													6.298.319.089			Sekretariat DPRD	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.790.312.478		2.400.000.000				2.826.262.100																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipertama dan Dipertiga	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipertama yang Diperiksa dan diperbaiki Pajaknya					148.426.500	1 Unit	150.000.000	1	Unit		98.716.500													148.426.500			Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Diperiksa dan diperbaiki Pajak dan Perbaikan					679.989.823	40 Unit	500.000.000	40	Unit		480.749.800													679.989.823			Sekretariat DPRD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Rehabilitasi					689.847.766	1 Unit	600.000.000	2	Unit		477.380.000													689.847.766			Sekretariat DPRD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Rehabilitasi					453.212.891	1 Unit	900.000.000	3	Unit		442.508.000													453.212.891			Sekretariat DPRD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Rehabilitasi					827.856.496	1 Unit	150.000.000	3	Unit		1.315.006.000													827.856.496			Sekretariat DPRD	
Layanan Keuangan dan Pengelolaan DPRD						18.786.351.889		18.999.161.604				19.046.100.297																	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggaran DPRD yang Menorasi Hak Keuangan DPRD					18.535.305.888	25 Orang/R dan	18.621.061.604	25	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		18.626.255.207													18.535.305.888			Sekretariat DPRD	
Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					241.850.000	4 Paket	302.090.000	4	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		345.840.000													241.850.000			Sekretariat DPRD	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					9.200.000	25 Orang	78.010.000	25	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		76.010.000													9.200.000			Sekretariat DPRD	
Layanan Administrasi DPRD						2.379.665.586		2.135.279.000				2.036.163.860																	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						1 Dokumen	3.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		2.802.960																Sekretariat DPRD	
Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil fasilitas rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					1.029.627.250	12 Laporan	1.062.270.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		985.300.000													1.029.627.250			Sekretariat DPRD	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)		RKPD (tabel bantu)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV						
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5		6		7		8				9		10=6+9		11=10/5x100%						
Penyediaan Kebukuan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Point Kebukuan Rumah Tangga DPRD yang disediakan				1.249.638.336	3 Paket	1.050.000.000	3	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1.047.200.900												
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cekupan layanan tugas fungsi anggaran	100	persen	119.908.807,343		16.208.038.513	180 Person	16.099.942.000		19.081.496.200												
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan					203.772.298	180 Person	1.278.900.000		1.268.087.200												
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					83.948.000	15 Dokumen	94.875.000	15	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	80.425.000						83.948.000		Sekretariat DPRD			
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					162.105.750	12 Dokumen	150.000.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	210.575.000						162.105.750		Sekretariat DPRD			
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan					-	2 Dokumen	18.975.000	2	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	16.750.000								Sekretariat DPRD			
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik yang Disahkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Disahkan					-	5 Dokumen	1.000.000.000	5	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	943.612.200								Sekretariat DPRD			
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun					9.718.500	1 Dokumen	12.650.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	11.725.000						9.718.500		Sekretariat DPRD			
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah kebijakan yang dibahas					820.907.637	160 Person	578.737.500		490.024.000												
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS					54.444.798	2 Dokumen	91.437.500	2	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	62.370.000						54.444.798		Sekretariat DPRD			
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD					94.882.230	1 Dokumen	154.687.500	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	139.318.000						93.332.250		Sekretariat DPRD			
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan					65.602.819	1 Dokumen	154.687.500	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	139.318.000						65.602.819		Sekretariat DPRD			
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					107.577.750	2 Dokumen	177.525.000	2	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	135.018.000						107.577.750		Sekretariat DPRD			
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pengawasan yang dilakukan					136.008.908	180 Person	223.544.500		200.487.000												
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					22.517.000	12 Laporan	23.375.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	21.027.000						22.517.000		Sekretariat DPRD			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					80.365.860	12 Laporan	78.540.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	70.735.000						80.365.860		Sekretariat DPRD			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					12.999.000	12 Laporan	33.566.500	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	30.100.000						12.999.000		Sekretariat DPRD			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					2.970.000	12 Laporan	33.566.500	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	30.100.000						2.970.000		Sekretariat DPRD			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					2.202.750	12 Laporan	33.566.500	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	30.100.000						2.202.750		Sekretariat DPRD			

Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target SP/MD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)			RKPD (tabel bantu)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RP/MD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	K			Rp	10=6+9		11=10/3x100%
3	4																										
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					3.663.000	1 Dokumen		6.326.000	1			5.895.000											3.663.000		Sekretariat DPRD	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran					11.310.750	2 Dokumen		14.576.000	2			12.730.000											11.310.750		Sekretariat DPRD	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/kursus					4.185.916.000	100 Person		5.422.440.000				6.089.375.000														
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					454.010.000	15 Dokumen		526.610.000	16			646.450.000											454.010.000		Sekretariat DPRD	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyiapan/Publikasi Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan					2.736.886.000	5 Dokumen		4.014.200.000	5			4.570.500.000											2.736.886.000		Sekretariat DPRD	
Penyiapan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli					553.610.000	6 Orang		524.860.000	6			518.625.000											553.610.000		Sekretariat DPRD	
Penyiapan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					391.410.000	1 Orang		356.770.000	5			351.800.000											391.410.000		Sekretariat DPRD	
Penyempitan dan Penghimpunan Anggota Masyarakat	Jumlah Anggota					1.506.733.427	100 Person		1.015.000.000				1.411.965.000														
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun					9.020.000	2 Dokumen		15.000.000	2			11.725.000											9.020.000		Sekretariat DPRD	
Pelaksanaan Riset	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Riset					1.541.703.427	3 Dokumen		1.890.000.000	3			1.400.260.000											1.541.703.427		Sekretariat DPRD	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah undang kode etik					2.045.000	100 Person		2.530.000				2.680.000														
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD					2.045.000	2 Laporan		2.530.000	2			2.680.000											1.045.000		Sekretariat DPRD	
Pembinaan Kerja Sama Daerah	Jumlah kegiatan					15.675.000	100 Person		26.300.000				19.078.000														
Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Penetapan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Penetapan Kerja Sama Daerah					-	1 Dokumen		22.300.000	1			15.056.000													Sekretariat DPRD	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun					15.675.000	1 Dokumen		3.000.000	1			4.020.000											15.675.000		Sekretariat DPRD	
Facilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi					9.881.939.859	100 Person		9.515.920.000				9.593.772.000														
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					9.881.939.859	12 Dokumen		9.515.920.000	12			9.593.772.000											9.881.939.859		Sekretariat DPRD	
KEMUKAAN						19.403.334.000																					
PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.761.505.901							17.946.374.340														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00	persen			74.139.318.680	8%/A	100 Person																			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.135.000	7 Dokumen		10.000.000	2			1.462.500											4.135.000		Badan Perencanaan Daerah	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD					2.875.000	1 Dokumen		8.000.000	1			1.125.000											2.875.000		Badan Perencanaan Daerah	

Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)		RKPD (tabel bantu)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mbitur Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mbitur Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mbitur Realisasi Kinerja SKPD					8.260.800	1 Laporan	5.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1.482.500							-	8.260.800			Badan Pendapatan Daerah		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan					HN/A	14 Dokumen	6.462.113.148			11.542.282.825							-						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					10.907.255.096	42 Orang/ bulan	6.462.113.148	42	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	11.522.671.825							-	10.907.255.096			Badan Pendapatan Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					78.687.128	1 Laporan	25.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	18.373.500							-	78.687.128			Badan Pendapatan Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					HN/A	2 Laporan	5.000.000	2	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1.237.500							-	HN/A			Badan Pendapatan Daerah		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemerintah pelayanan administrasi Kepegawaian					HN/A	100 %	738.000.000			695.596.000							-						
Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					HN/A	1 Paket	500.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	334.391.000							-	HN/A			Badan Pendapatan Daerah		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					65.777.228	5 Orang	230.000.000	5	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	261.205.000							-	65.777.228			Badan Pendapatan Daerah		
Administrasi Urutan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan					HN/A	12 Bulan	978.284.642			2.180.723.910							-						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					11.468.565	4 Paket	48.070.000	4	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	30.437.500							-	11.468.565			Badan Pendapatan Daerah		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1.065.058.595	10 Paket	250.000.000	10	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	507.216.266							-	1.065.058.595			Badan Pendapatan Daerah		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					116.929.500	20 Paket	31.224.642	20	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	210.234.386							-	116.929.500			Badan Pendapatan Daerah		
Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan					17.480.000	5 Paket	50.000.000	5	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	609.219.786							-	17.480.000			Badan Pendapatan Daerah		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					HN/A	12 Dokumen	10.000.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	15.330.000							-	HN/A			Badan Pendapatan Daerah		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					743.845.498	16 Laporan	597.000.000	56	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	788.286.000							-	743.845.498			Badan Pendapatan Daerah		
Pengadaan Barang Milik Daerah Perungung Urutan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Mobil					196.535.000	3 Item	250.000.000			217.335.000							-						
Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan					196.535.000	5 Unit	250.000.000	5	unit	217.335.000							-	196.535.000			Badan Pendapatan Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan					3.370.581.338	12 Bulan	2.503.975.426			2.437.188.000							-						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat Menyurat					6.000.000	1 Laporan	8.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	8.000.000							-	6.000.000			Badan Pendapatan Daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					291.112.410	12 Laporan	283.445.971	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	324.000.000							-	291.112.410			Badan Pendapatan Daerah		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)			RKPD (tabel bantu)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K			Rp			K			Rp			K		Rp		K		Rp		K		Rp		K			Rp	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
3	4													8										9		10=6+9		11=10/5x100%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan						2.073.388.929	48 Laporan	2.212.529.455	48	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		2.105.188.000													-	2.073.388.929			Badan Pendapatn Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan						RN/A	12 Bulan	794.122.685				892.196.700																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						RN/A	3 unit	220.122.685	5	unit		266.109.500													-	RN/A			Badan Pendapatn Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan						394.696.527	28 Unit	140.000.000	28	unit		378.813.900													-	394.696.527			Badan Pendapatn Daerah
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara						44.695.550	5 unit	80.000.000	5	unit		81.020.000													-	44.695.550			Badan Pendapatn Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi						RN/A	2 unit	365.000.000	2	unit		168.456.300													-	RN/A			Badan Pendapatn Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	persen		14.134.338.372		RN/A	14.951.958.11	7.641.828.182				16.678.072.000																	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Bulan						RN/A	12 bulan	7.641.828.182				16.678.072.000																	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak Daerah						3.074.519.588	3 Dokumen	150.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		468.911.200													-	2.074.519.588			Badan Pendapatn Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah						196.110.250	12 Laporan	170.000.000	12	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		147.842.200													-	196.110.250			Badan Pendapatn Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						500.780.493	180 unit	4.496.286.540	100	unit		12.806.054.220													-	500.780.491			Badan Pendapatn Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						433.440.782	11 Laporan	200.000.000	11	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		1.064.465.430													-	433.440.782			Badan Pendapatn Daerah
Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Sisa Pemertahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHATB)	Jumlah Objek Pajak yang Diriskusikan KUPF nya						226.265.428	46000 Objek a Pajak	1.700.000.000	46.000	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		1.218.304.870													-	226.265.428			Badan Pendapatn Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah						363.054.123	11 Layanan	74.758.032	11	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		263.671.726													-	363.054.123			Badan Pendapatn Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Pemertihan dan Verifikasi						384.093.730	11 Dokumen n	411.503.241	11	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		247.618.168													-	384.093.730			Badan Pendapatn Daerah
Pengajian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengajian Pajak Daerah						16.493.400	40 Dokumen n	32.000.000	40	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		145.777.286													-	16.493.400			Badan Pendapatn Daerah
Pengendalian, Pemertakuan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemertakuan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						35.433.000	11 Dokumen n	207.280.369	11	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		291.470.000													-	35.433.000			Badan Pendapatn Daerah
Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah						RN/A	1 Laporan	200.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		202.957.120													-	RN/A			Badan Pendapatn Daerah
KEUANGAN									29.636.796.092																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	persen		74.174.104.930		RN/A	100 persen	16.364.061.997				15.086.680.714																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.130.000	3 Dokumen	25.000.000				24.891.350																	
Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.530.000	1 Dokumen	10.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		8.755.450													-	8.510.000			Badan Pengolahan Keuangan dan Asst Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD						3.960.000	3 Laporan	7.500.000	2	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		7.080.450													-	3.960.000			Badan Pengolahan Keuangan dan Asst Daerah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)			RKPD (tabel bantu)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.600.000	1 Laporan		7.500.000	1		8.758.450															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.511.777.852	8 Dokumen		9.068.869.776			10.118.618.906															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN						7.717.317.715	48 orang/bulan		8.078.869.776	48		9.776.422.506															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Vertikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajian/Vertikasi Keuangan SKPD						188.000.137	42 Dokumen		75.000.000	42		326.320.500															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.100.000	1 Laporan		7.500.000	1		8.755.450															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran						2.300.000	1 Dokumen		7.500.000	1		7.320.450															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi						202.559.300	1 Laporan		6.500.000			3.730.450															
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						202.559.300	1 Laporan		6.500.000	1		3.730.450															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan administrasi kepegawaian						#N/A	12 orang		522.860.000			1.494.808.450															
Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						#N/A	67 Paket		200.000.000	67		396.787.450															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						361.118.382	16 orang		272.850.000	16		1.098.018.000															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						#N/A	18 orang		25.000.000	18																	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Bindegan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bindegan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						#N/A	18 orang		25.000.000	18																	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum						#N/A	6 laporan		2.331.742.221			2.887.409.822															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						67.630.790	12 Paket		100.000.000	12		60.209.969															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						698.547.600	12 Paket		560.204.034	12		569.624.859															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan						#N/A	1 Paket		75.000.000	1		51.159.195															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan						179.070.375	2 Paket		314.213.973	2		190.908.707															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan						156.394.512	6 Paket		224.974.214	6		183.508.543															Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2022)				RKPD (tabel bantu)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2023)								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I				II				III				IV							
		K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Penyelenggaraan yang Disiapkan						32.575.000	1 Dokumen		40.000.000	3		39.907.000																				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD						1.203.924.797	12 Laporan		917.350.000	12		1.398.657.000																				
Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD						#N/A	1 Dokumen		100.000.000	1		353.868.550																				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan						#N/A	23 unit		350.000.000			648.406.336																				
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disiapkan						59.909.509	18 unit		100.000.000	18		90.819.226																				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan						#N/A	1 Unit		150.000.000	1		528.157.189																				
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disiapkan						#N/A	1 Unit		25.000.000	1																						
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disiapkan						#N/A	1 Unit		50.000.000	1																						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disiapkan						#N/A	1 Unit		25.000.000	1		20.519.920																				
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah						2.634.771.243	36 Laporan		2.810.000.000			2.981.200.000																				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.643.000	12 Laporan		10.000.000	12		10.014.000																				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan						522.670.819	12 Laporan		450.000.000	12		494.000.000																				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan						2.282.457.424	12 Laporan		2.350.000.000	12		2.387.186.000																				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Barang Milik Daerah yang dipelihara						#N/A	33 unit		1.250.000.000			1.039.634.400																				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						453.934.283	3 Unit		250.000.000	5		42.120.900																				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pembelian Kendaraan Dinas Operasional atau Labrakon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Labrakon yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pembelian						#N/A	40 unit		500.000.000	40		475.581.969																				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						144.429.150	5 Unit		150.000.000	5		243.400.000																				
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara						#N/A	1 Unit		25.000.000	1																						
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara						#N/A	1 Unit		25.000.000	1		76.690.000																				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi						271.361.032	1 Unit		130.000.000	3		201.752.000																				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi						#N/A	1 Unit		125.000.000	1																						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi						#N/A	1 Unit		25.000.000	1																						
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100	persen				31.695.557.982	#N/A	100 persen	11.606.095.986			13.823.106.684																				
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan APBD yang dibuat						#N/A	30 Dokumen		2.605.068.494			3.767.530.357																				
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun						261.545.000	4 Dokumen		284.888.330	4		358.525.000																				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun						256.375.000	4 Dokumen		280.000.000	4		369.470.000																				

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)		RKPD (tabel bantu)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBOP 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3	4		5		6		7		8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	K	Rp	10=6+9	K	Rp	11=10/5x100%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembelian, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembelian, Pendapatan LO dan Beban					259.912.200	1 Dokumen	180.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													259.912.200			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					121.014.950	1 Laporan	65.895.280	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													121.014.950			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koreksidat Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkoreksidat					4N/A	1 Laporan	45.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													4N/A			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					177.366.500	1 Dokumen	100.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													177.366.500			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					159.538.800	1 Dokumen	200.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													159.538.800			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah					4N/A	1 Dokumen	9.200.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													4N/A			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					80.808.800	4 Dokumen	55.183.000	4	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													80.808.800			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					4N/A	1 Dokumen	50.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													4N/A			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi					75.474.913	3 Dokumen	10.210.000	3	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													75.474.913			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					457.505.281	91 Orang	540.000.000	31	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													457.505.281			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina					4N/A	2 Lembar	10.000.000	2	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													4N/A			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota					4N/A	3 Laporan	9.200.000	2	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													4N/A			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Usulan Kemungkinan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan penyusunan usulan kemungkinan pengelolaan keuangan daerah					4N/A	3 Kegiatan	6.731.450.815																		
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah					4N/A	1 Laporan	20.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													4N/A			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					312.747.040	1 Laporan	50.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													312.747.040			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Dana Danaur dan Mendesak	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Danaur dan Mendesak					2.472.539.660	1 Laporan	6.681.450.815	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													2.472.539.660			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi SPO Lingkup Keuangan Daerah					4N/A	3 Dokumen	425.000.000																		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2022)		RKPD (tabel bantu)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBOP 2023)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									I		II		III		IV							
		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Berorientasi Masyarakat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Berorientasi Masyarakat	40	orang	40	orang	40	orang	40	orang	5	21.282.195	8	337.638.848	27	1.142.745.112		1.607.886.147		3.816.285.889			Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Bersifat	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Air Ayakak, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana produksi dan distribusi obat bersifa dan memenuhi standar		140.410.000		6.220.000	14	perors		25.000.000		34.993.000		7.184.200		10.584.200		17.708.400					Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Peredaran Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Peredaran Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen		0,5	7.184.200		0,5	10.584.200		17.708.400		23.985.400			Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai isi Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana PHT yang bersifa yang memenuhi standar		271.324.000		244.184.600	60	persen		60.000.000		404.415.000		91.489.552		188.647.124		280.136.676					Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Peredaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai isi Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai isi Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen		0,5	91.489.552		0,5	188.647.124		280.136.676		524.201.278			Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan		140.410.000		82.536.500	16	persen		100.000.000		31.875.000		3.300.000		11.085.000		15.807.400		36.192.400			Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen		0,3	3.300.000		0,3	11.085.000		15.807.400		30.192.400		112.725.900	Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase serta makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan sesuai standar		87.846.000		21.212.500	16	persen		60.000.000		18.367.700		4.540.000		8.304.900		12.844.900		34.057.400			Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen		0,5	4.540.000		0,5	8.304.900		12.844.900		34.057.400			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemasukan 3 Master kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Penguatan Perilaku dan Gizi, Peningkatan Pencapaian dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	55	persen	55	persen	55	persen	55	persen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan/ regulasi/ pelaksanaan/ penerapan kebijakan GERMAS		130.755.000		26.400.000	1	bukal		50.000.000		60.790.936		15.642.158		38.093.000		53.736.158		90.385.158			Dinas Kesehatan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Aktivasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Aktivasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen		0,5	15.642.158		0,5	38.093.000		53.736.158		90.385.158			Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PHBS 5 Tahunan (Rumah tangga seluruh indikator kesehatan tempat kerja tempat umum)		325.310.000		477.806.028	68	persen		100.000.000		427.134.000		25.500.000		269.447.814		294.947.814		772.753.642			Dinas Kesehatan
Pengembangan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen		0,5	25.500.000		0,5	269.447.814		294.947.814		772.753.642			Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Penyuluhan AKDR		360.025.000		241.354.389	68	persen		100.000.000		394.971.525		5.000.000		12.610.000		325.157.027		384.721.436			Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Simbangin Telen dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen		0,3	5.000.000		0,3	12.610.000		325.157.027		384.721.436			Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (PSUP)	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen		82.142.794.025											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		68.160.303.136		8	Suplemen	71.000.000.000		70.223.538.820													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		68.308.351.512		688 Orang/ bulan	70.000.000.000		608	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		77.325.035.911								68.308.351.512			Dinas Kesehatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		553.751.684		1	Dokumen	1.000.000.000		1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		808.500.914							553.751.684			Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum		603.313.302		4	Suplemen	100.000.000															
Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Fasilitas dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		603.313.302		1	Paket	100.000.000		1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)									603.515.302			Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemungutan Usulan Pemeliharaan Daerah	Terdapatnya sumber daya air, tanah, komunalitas dan tanggul kontrol daerah		3.453.671.198		32	bulan	4.400.000.000				3.152.400.000											

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Tahun Lalu (2022)		RKPD (tabel bantu)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBDP 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang Tahun s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I		II		III		IV												
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				#/A	1 Dokumen	150.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	152.493.069																		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				#/A	1 Dokumen	250.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	254.847.716																		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				#/A	31 Orang	25.000.000	31	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	24.999.000																		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Evaluasi data rencana BMD dengan Monev setiap di negara Pemerintah kota	100	persen	15.812.114,96		2.548.830.595	100	persen	1.606.777.509																		
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan BMD baik pada tingkat pengawas barang maupun pengelola barang						2.533.820.520	42	OPD	1.606.777.509																		
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun						766.716.044	1	Dokumen	250.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	801.125.958													764.716.044		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						83.257.191	2	Dokumen	83.777.509	2	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	73.177.202													83.257.191		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan barang Milik Daerah						202.118.200	1	Laporan	175.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	172.380.000													202.118.200		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah						293.183.062	4	Laporan	150.000.000	4	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	140.973.460													293.183.062		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah						231.351.128	1	Laporan	200.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	200.026.058													231.351.128		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						40.339.250	2	Laporan	50.000.000	2	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	50.000.000													40.339.250		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemertanagungan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemertanagungan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						345.910.228	3	Dokumen	250.000.000	3	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	313.071.381													345.910.228		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						65.351.595	31	Laporan	100.000.000	31	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	57.740.652													65.351.595		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun						215.401.999	1	Laporan	50.000.000	1	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	243.454.200													215.401.999		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						292.191.837	31	Orang	300.000.000	31	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	547.640.000													292.191.837		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan kesehatan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan kesehatan Kota Bontang digunakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan standar yang ditetapkan oleh PP Nomor 02 tahun 2019. Adapun analisis kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bontang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bontang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021/2	Tahun 2022/3	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase FKTP Milik Pemerintah yang terakreditasi		√	100	100	100	100	100%	100%	100	100	
2	Persentase FKTP dan FKTL Swasta yang terakreditasi		√	100	100	100	100	100%	100%	100	100	
3	Persentase sarana Faskes yang memenuhi syarat			100	100	100	100	100%	100%	100	100	
4	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk		√	1:30.000	1:30.464	1:25.000	1:25.000	1 : 16.000	1 : 4374	1 : 4374	1 : 4374	
5	Persentase Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		√	100	100	100	100	104,3%	102,78%	100	100	
6	Persentase FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan Terpadu		√	95	95	95	95	100%	100%	100	100	
7	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup		√	275	250	200	183	119	0	0	0	a. IKU Dinkes b. Penetapan target tahun 2024 mengacu pada capaian tahun 2023

8	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 bayi		√	15,94	11	11	11	11	13,48	0	0	
9	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 balita			7	6	5	5	0,3	0,3	0	0	
10	Prevalensi Balita Gizi Kurus / Wasting (BB/TB)		√	7,36	7	7	7	8,1	8,03	6	6	
11	Prevalensi Baduta pendek / Stunting (TB/U)		√	19,73	18	18	18	23,06	16,22	14	14	
12	Prevalensi Gizi Kurang / Underweight (BB/U)		√	12,27	13	12	12	15,13	15,67	11	10	
13	Insidensi Rate DBD per 100.000 penduduk		√	275	250	230	230	316,00	244	210	200	
14	Angka kesembuhan TB	√	√	91	92	93	93	86	85	94	95	
15	Prevalensi HIV/AIDS	√	√	0,17	0,17	0,17	0,17	0,27	1,21	0,16	0,16	
16	Prevalensi Hipertensi	√	√	25	25	25	25	3,64	9,23	9	9	
17	Persentase penanggulangan penyakit berpotensi wabah			100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan			90	95	95	95	100	100	100	100	
20	Persentase TTU yang memenuhi Syarat			90	95	95	95	100	100	100	100	
22	Persentase TPM yang memenuhi syarat (memiliki sertifikat)			56	60	65	65	100	100	100	100	
21	Persentase FKTP dengan SDM			100	100	100	100	100%	100	100	100	

	sesuai standar											
22	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS		√	50	55	60	60	100%	0	70	70	
24	Indeks Keluarga Sehat (IKS)			100	100	100	100	80%	80%	100	100	
25	Persentase capaian indicator Kota Sehat			90	90	90	90	100	0	90	90	
26	Indeks Kepuasan Masyarakat											

Berdasarkan analisa pelayanan kinerja Dinas Kesehatan tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angak Kematian Ibu	Rasio/100.000 Kelahiran Hidup	0
		Angka Kematian Bayi	Rasio/1.000 Kelahiran Hidup	10
2.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	Angka Kesembuhan TB	Persen	94
		Prevalensi HIV	Persen	0,16
		IR DBD	Rasio/100.000 Penduduk	210
		Prevalensi Hipertensi	Persen	9
3.	Meningkatkan Jaminan Layanan Universal Coverage	Cakupan Kepesertaan JKN	Persen	100
4.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap PHBS, Pola Asuh dan Pola Makan	Prevalensi Balita Gizi Kurang (Wasting)	Persen	6
		Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)	Persen	17
		Prevalensi Balita Gizi Kurus (BB Kurang/Underweight)	Persen12	11
5.	Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Berizin	Persen	100
		Jumlah FKTP dengan SDM Sesuai Standar (Jumlah, Jenis dan Kompetensi)	FKTP	6
		Jumlah RS dengan SDM Sesuai Standar	RS	6
		Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Pelatihan Sesuai Standar	Orang	125
		Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Pendidikan	Orang	30
6.	Menyediakan Sarana dan Prasarana	Rasio Fasilitas Kesehatan tingkat	Rasio	1:16.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Layanan Kesehatan	Pertama (FKTP) Persatuan Penduduk		
		Persentase FKTP Milik Pemerintah yang Terakreditasi	Persen	100
		Terbangunnya Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SikDa) Terpadu	Persen	100
		Ketersediaan Obat Essensial	Persen	100
		Persentase Sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	Persen	100
7.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan	SPM RSUD	Persen	129 (84,8)
		Status Akreditasi	Status	Paripurna
		Kinerja Keuangan RSUD	Skor	21
8.	Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Penerapan/Pelaksanaan 5 Kluster Kebijakan GERMAS di Kelurahan	Persentase	67

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Sejalan dengan program yang merupakan inisiasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan tranformasi kesehatan yang mencakup 6 (enam) pilar yang akan menjadi penopang sistem Kesehatan Indonesia, Dinas kesehatan harus bergerak bersama dalam mewujudkan kegiatan tersebut dengan menyeleraskan tugas dan fungsi sebagai isu-isu penting antara lain :

- a) Transformasi Layanan Primer dimana dalam penerapannya memiliki fokus memperkuat aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, memperbaiki skrining kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan primer (mengoptimalkan peranan posyandu, Poskekel);
- b) Penurunan angka stunting dengan meningkatkan/perbaiki gizi masyarakat terutama bayi, balita dan perhatian khusus terhadap ibu hamil;

- c) Memberikan perhatian khusus pada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV, malaria, TBC dll;
- d) Penguatan Jejaring dan Kemitraan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- e) Peningkatan kualitas dan kompetensi dokter dan paramedis lainnya, menambah jumlah dokter spesialis dan menyekolahkan tenaga medis ke jenjang pendidikan lebih tinggi;
- f) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, baik di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang, Labkesmas maupun pusat kesehatan lainnya, hingga memenuhi standar–standar pelayanan kesehatan;
- g) Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah Sakit dengan fasilitas lengkap dan berkualitas dengan Sistem rujukan kerumah sakit yang lebih mudah;
- h) Memastikan semua masyarakat yang tidak memiliki asuransi kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang preminya dibayarkan melalui APBD;
- i) Peningkatan kualitas Penyehatan Lingkungan : STBM 5 Pilar
- j) Penguatan Sistem Deteksi Pencegahan dan Respon Pencegahan dan pengendalian Penyakit;
- k) Memfungsikan gedung RSUD Type D;

Pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal harus memenuhi unsur kualitas hidup serta unsur mortalitas, morbiditas, dan status gizi masyarakat. Pada tahun 2023 secara umum kualitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kota Bontang mengalami peningkatan. Cakupan upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat meskipun menunjukkan peningkatan trend yang positif, namun masih ada beberapa indikator yang memiliki kinerja yang masih kurang beserta solusi tindaklanjut yaitu antara lain :

1. Angka Kematian Bayi berdasarkan capaian kinerja tahun 2023, indikator ini telah mencapai 13,8/1000 kelahiran hidup dari target 11/1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja -2,8% atau terdapat 41 kasus kematian dibagi 3042 kelahiran hidup X 1000. Penyebab permasalahan kematian terdapat 41 kasus Angka Kematian Bayi (AKB) disebabkan oleh Neonatal (bayi 0-28 hari): 10 BBLR, 3 Prematur, 10 Kelainan Konginetal, 2 Asfiksia, 3 Infeksi, dan lain-lain

berjumlah 8 (pulmonary bleeding, keluarga tidak tau penyebab meninggal, MAS atau Meconium Aspiration Syndrome, gagal nafas, hiperglikemia, terdapat cairan di paru, Hyaline Membrane Disease (HMD) Grade 2, Sindrom gangguan pernapasan (RDS). Sedangkan untuk penyebab dari Post Neonatal (1-11 bln) dikarenakan 1 pneumonia, 1 kelainan konginetal, dll terdapat 3 (demam, aspirasi, tidak tahu penyebabnya atau meninggal di rumah).

Adapun tindakan pengendalian yang sudah dilaksanakan terkait hal ini adalah dengan melaksanakan monitoring kesehatan ibu hamil, penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan (mis : USG), peningkatan pengetahuan SDM yang merata terkait penanganan BBLR di semua Faskes. Monitoring Kes Ibu hamil : Pelayanan K1 (Kontak pertama bumil dengan pemeriksaan USG). K6 (Pemantauan minimal 6 kali selama kehamilan/sesuai trimester kehamilan + pemeriksaan dokter 1 kali trimester 1 dan 1 kali trimester 3). Penyediaan Prasarana Pely.Kesehatan (Menyediakan NIKSET, Penyediaan Oxymeter Neonatal, menyediakan partus set yang lengkap). Pemantauan terpadu Balita Sakit dan Pemantauan Terpadu Bayi Muda.

2. Insidensi Rate DBD per 100.000 penduduk. Demam Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti*. Penyakit ini dapat menyerang semua orang terutama pada anak, dan sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia. Penyakit ini ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis, dan menjangkit luas di banyak negara di Asia Tenggara. Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit berbasis vektor yang menjadi penyebab kematian utama di daerah tropis. Virus Dengue penyebab Demam Dengue (DD), Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Dengue Shock Syndrome (DSS) termasuk dalam kelompok B Arthropoda Virus (Arbovirosis) yang sekarang dikenal sebagai genus *Flavivirus*, famili *Flaviviridae*, dan mempunyai 4 jenis serotipe, yaitu: Den-1, Den-2, Den-3, Den-4. Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di Kota Bontang. Setiap tahun, kejadian penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Bontang cenderung meningkat pada pertengahan musim penghujan. indikator Insidensi Rate (IR/Angka Kesakitan) DBD tahun 2023 mencapai 244

/100.000 penduduk dibandingkan target 230/100.000 penduduk, maka capaian ini dapat dikatakan masih rendah yakni sebesar -14%. Sejak tahun 2017, angka kesakitan atau IR DBD mengalami peningkatan kasus dan terjadi KLB DBD pada tahun 2019 tetapi di tahun 2021 angka kesakitan DBD masih tinggi. Target akhir Renstra Dinas Kesehatan untuk IR / angka kesakitan DBD sebesar 50/100.000 penduduk lebih tinggi 1 poin dari target Renstra Kemenkes yaitu 49/100.000 penduduk. Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan tahun 2026 maka capaiannya sebesar minus 643,3/100.000 penduduk, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Kemenkes maka capaiannya sebesar minus 656,3. Dalam Hal ini Dinas Kesehatan Kota Bontang melakukan upaya optimal pencegahan dan pengendalian penyakit untuk menurunkan angka kesakitan / IR DBD dengan bekerja sama Kemenkes, Bontang sebagai salah satu daerah *pilot project* Pengembang biakan nyamuk wolbachia dalam mengendalikan perkembangan nyamuk Aedes Aegypti.

3. Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)/(TB/U), Indikator masalah gizi adalah indikator yang digunakan untuk menilai besaran masalah gizi yang terjadi di satu wilayah. Indikator masalah gizi salah satunya adalah Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)/(TB/U). Pertumbuhan Balita pendek (Stunting) merupakan masalah gizi yang bersifat serius dapat disebabkan karena masalah kronis ataupun akut, sehingga perlu konfirmasi lebih lanjut. Masalah gizi yang terjadi lama akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Indikator ini sebagai indikator outcome yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari upaya program gizi yang telah dilakukan. Capaian Kinerja Indikator Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)/(TB/U) Kota Bontang Tahun 2023 diketahui bahwa realisasi telah mencapai 16,22% dari target yang ditetapkan sebesar 18% dengan capaian mencapai 1,78% dengan kinerja baik, namun dalam hal ini belum mencapai target nasional sebesar 14%. Penyebab permasalahan gizi pada balita ini adalah karena pola asuh dan pola makan tidak sesuai standar sehingga angka kecukupan gizi tidak sesuai dengan usia anak, banyak bumil Kurang Energi Kronik (KEK) dan anemia, pemantauan

pertumbuhan balita masih rendah, fasilitas yang belum memenuhi standar atau pasien yang belum mendapatkan layanan sesuai standar.

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi realisasi capaiannya 82,42% masih dibawah target SPM dan Daerah 100% hal ini disebabkan perilaku dan kesadaran terhadap pola hidup sehat serta sistem pencatatan dan pelaporan pasien hipertensi di fasilitas kesehatan swasta belum terintegrasi sehingga ada beberapa data yang lost dari pelaporan dan untuk skrining dan pelayanan pasien dengan hipertensi hanya yang berkunjung ke Faskes serta masiha rendahnya partisipasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terkait hipertensi, termasuk memeriksakan segera ke sarana kesehatan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain mendorong masyarakat untuk memeriksakan diri ke sarana kesehatan, dan melakukan integrasi dengan fasilitas kesehatan.
5. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Reproduksi yang masih dibawah target capaian yaitu 70,04% dengan target yang seharusnya dicapai sebesar 100%, hal tersebut dikarenakan jumlah sasaran yang besar yang mengharuskan kebutuhan logistik dan SDM yang cukup banyak dan belum adanya integrasi skrining usia produktif dengan penjangkaran UKS serta pelaksanaan indikator PIS PK dengan penetapan yang berbeda serta sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi dengan fasilitas kesehatan swasta atau jejaring puskesmas. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan target capaian adalah Mengoptimalkan kegiatan skrining melalui integrasi dgn penjangkaran UKS, OPD/Lembaga dan PIS PK dengan mengoptimalkan indikator yg dapat dilaksanakan (yg tidak terlaksana yaitu pengukuran gula darah sewaktu dan IVA serta Mengusulkan agar komponen logistik gula darah, IVA menjadi tanggungjawab provinsi dan pusat dan menyusun regulasi pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan di Posbindu.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kesehatan adalah :

1. Perubahan kebijakan Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar di Kota Bontang, menyebabkan ada beberapa sumberdaya saat ini kurang terpenuhi dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan penambahan, relokasi sumberdaya dalam rangka

mendukung upaya revitalisasi pelayanan agar pelayanan dapat lebih optimal.

2. Peran serta masyarakat dan sektor swasta, serta kesadaran masyarakat untuk turut serta melaksanakan pembangunan kesehatan masih belum optimal, hal ini digambarkan dari beberapa indikator kesehatan yang tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan peran serta masyarakat dan angka capaiannya masih tergolong rendah, yakni Menurunkan AKI dan AKB, UCI kelurahan, pelayanan anak balita, penemuan kasus TBC Paru, Menurunkan Angka Kejadian DBD dan Malaria serta pengendalian penanganan kasus KLB lainnya.
3. Masih kurang optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan kasus, terutama yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan penanganan kasus oleh sarana kesehatan (klinik, praktek dokter, praktek bidan) yang ada di wilayah Puskesmas.
4. Koordinasi dengan lintas sektor terkait yang masih kurang, masing-masing OPD bekerja secara parsial.
5. Adanya kepercayaan pada masyarakat, seperti terhadap kehalalan vaksin yang berpengaruh terhadap tingkat imunisasi.
6. Masih adanya gap kompetensi kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia terutama dalam penanganan dan pelayanan kasus-kasus yang memerlukan skill yang harus dapat ditangani di lingkup pelayanan kesehatan dasar terutama pada penerapan BPJS bidang kesehatan.
7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi oleh petugas termasuk jejaring pelayanan kesehatan yang lain yang masih kurang.
8. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi, sehingga menyulitkan dalam penetapan dan pemetaan data sasaran, akibatnya intervensi terhadap sasaran kurang akurat.
9. Upaya penanggulangan penyakit menular yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan masih sangat fluktuatif, menunjukkan pendekatan yang perlu lebih diintensifkan dan perlunya upaya-upaya terobosan, diantaranya melalui pendekatan hukum (regulasi).
10. Belum optimalnya pemanfaatan dana kapitasi BPJS, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

11. Pengembangan Regulasi Pemanfaatan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan di Puskesmas dan Klinik Pegawai.
12. Pengembangan Regulasi Integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan suatu keharusan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat diperoleh melalui peningkatan kompetensi dan memberikan pelatihan baik penjenjangan, teknis fungsional, maupun manajemen kesehatan. Disamping itu pemenuhan sarana dan prasarana unit pelayanan puskesmas dan jaringannya serta penunjang pelayanan kesehatan seperti laboratorium sesuai dengan standar pelayanan kesehatan serta menyusun standar operasional prosedur pelayanan bidang kesehatan. Dengan upaya tersebut maka kinerja organisasi akan senantiasa mengalami peningkatan pada tahun-tahun kedepan.

Dalam hal penyusunan program/kegiatan untuk pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya masih ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus dan prioritas pelaksanaan seperti :

1. Kebijakan walikota terkait Bidang kesehatan antara lain :
 - a. Efek dari perubahan kebijakan Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar berimplikasi pada redesain organisasi dan manajemen UPTD sesuai kebutuhan dan dinamika lingkungan dan peraturan yang berlaku, meliputi perubahan struktur organisasi, job description, alur pelayanan SOP, penambahan sumberdaya baik tenaga, sarana prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan, dan relokasi sumberdaya, termasuk pembangunan fisik serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan baik agar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - b. Pemberian jaminan pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat di puskesmas dan rumah sakit baik untuk rawat jalan maupun rawat inap kelas 3 tetap dilanjutkan dengan upaya penambahan benefit bagi peserta.
 - c. Optimalisasi Kegiatan Pembangunan Kesehatan untuk peningkatan capaian program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Standar Nasional) yaitu Standar SPM Kesehatan dan MDG's/SDG's.

2. Upaya Peningkatan Perlindungan Terhadap Kesehatan Masyarakat (pemberian Protektif), Perlindungan terhadap masyarakat ditingkatkan melalui implementasi Perda Nomor 7 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan. Pengawasan terhadap semua aspek yang terkait seperti penertiban perizinan baik sarana, tenaga, pengobatan tradisional dan usaha industri makanan, termasuk kantin sekolah ditingkatkan. Peningkatan sarana penunjang pelayanan kesehatan seperti laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) diarahkan pada pemeriksaan berbasis lingkungan.
3. Upaya kesehatan lainnya yang bersifat rutin dan merupakan suatu keharusan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan komitmen global seperti SDG's.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD

Dinas Kesehatan Kota Bontang akan melaksanakan 5 program untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Adapun sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang adalah :

1. Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
2. Meningkatnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
3. Meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bontang

No.	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	89 %	Rp. 298.760.038.259,	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	89 %	Rp. 298.760.038.259,	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi , Ketersediaan obat Esensial, Cakupan Kepesertaan JKN	200 11 100 100	Rp. 190.282.786.075,	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi , Ketersediaan obat Esensial, Cakupan Kepesertaan JKN	200 11 100 100	Rp. 190.282.786.075,	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bontang	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100 %	Rp. 1.826.250.000,	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bontang	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100 %	Rp. 1.826.250.000,	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Bontang	Persentase sarana produksi obat, sarana distribusi obat dan makanan yg berizin	100%	Rp. 435.600.000,	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Bontang	Persentase sarana produksi obat, sarana distribusi obat dan makanan yg berizin	100%	Rp. 435.600.000,	

5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kota Bontang	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	40 %	Rp. 749.000.000,	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kota Bontang	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	40 %	Rp. 749.000.000,	
---	--	--------------	--	------	------------------	---	--	--------------	--	------	------------------	--

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan penetapan program/kegiatan di dalam Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan untuk tahun 2025. Hal ini dikarenakan kebutuhan perangkat daerah yang tertuang di Renstra OPD masih semua terakomodir pada ranwal RKPD, Namun ada beberapa pagu indikatif yang harus menyesuaikan kebutuhan program kesehatan di Tahun 2025 seperti sarana dan prasarana layanan kesehatan dan kefarmasian untuk peningkatan dan pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Kesehatan Kota Bontang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Kesehatan Kota Bontang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sesuai dengan peraturan yang ada, saat ini Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Perencanaan yang bersifat *bottom up* telah dilaksanakan mulai dari tingkat RT, Kelurahan, dan Kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan

Berikut usulan Musrenbang Tingkat Kota yaitu:

1. Pembangunan/rehabilitasi posyandu
2. Rehabilitasi gedung puskesmas
3. Fasilitasi kegiatan posyandu

Secara umum semua usulan masyarakat yang telah diusulkan pada Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kota telah diakomodir dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pelayanan kesehatan esensial adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat dan perlu diprioritaskan keberlanjutannya selama situasi pandemi. Pelayanan tersebut dilakukan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan melalui UKM.

Berdasarkan tabel II.5 diatas untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan sebesar Rp. **371.184.449.651.00,-** sesuai dengan pagu yang telah di rumuskan oleh Tim Penyusun Perencanaan Anggaran Kota Bontang.

Adapun usulan kegiatan tersebut setelah di analisis prioritas kegiatan pada masing-masing program (seksi) dan Rumah Sakit Umum Daerah sehingga terdapat beberapa kegiatan yang mendapatkan pengurangan ataupun penambahan anggaran sesuai dengan Prioritas Masalah dan Target SPM Kesehatan serta Capaian Indikator Program di masing-masing Seksi/Program.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang tenaga kerja mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap keempat, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Review kebijakan adalah telaah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum dengan tujuan melakukan perubahan yang implikasinya lebih baik bagi masyarakat luas. Review kebijakan merupakan langkah penting dalam penyusunan rencana dan pengambilan keputusan dalam implementasi pembangunan. Semakin banyak dukungan (sinergitas) program-program di tingkat pelaksana akan semakin mudah upaya untuk mensinergikan program maupun pembiayaan implementasi.

Adapun rencana kajian terkait pelayanan kesehatan yang perlu untuk ditindak lanjuti antara lain : (lihat RKP/Rencana kerja kemenkes

- a. Memperkuat promotif dan preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga;
- b. Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP dan alat kesehatan yankes primer;
- c. Memperkuatnya tatakelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta;
- d. Memperkuatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
- e. Memperkuatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai universal health coverage (UHC); dan
- f. Meningkatkan pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas.

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan untuk jenis tenaga tertentu yang masih belum terpenuhi, pengembangan karir belum berjalan, sistem penghargaan dan sanksi belum berjalan sebagaimana mestinya.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang telah diperdakan perlu dioptimalkan, pelaksanaannya harus terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan perlu disinkronkan dengan OPD terkait dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi.

Sistem Informasi kesehatan yang dikembangkan belum optimal, pemanfaatan data data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Permasalahan pada harmonisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi Dinas Kesehatan dan dengan rumah sakit serta komitmen pemerintah kota untuk membiayai pembangunan kesehatan sesuai yang tercantum dalam SKD yaitu sebesar 10 % dari APBD.

Promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.

Untuk gizi perlu difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan anak sampai usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktifitas generasi yang akan datang.

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan, melainkan tanggungjawab sektor lain, disamping tanggungjawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan SKD dapat dilakukan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dan OPD lain yang terkait.

Isu strategis internasional antara lain globalisasi seperti Sustainable Development Goals (SDG's), Isu Strategi Nasional seperti New Emerging Disease, deregulasi diberbagai perijinan, pemberdayaan masyarakat, kerusakan dan pencemaran lingkungan.

National Summit, ada 4 isu pokok pembangunan kesehatan yaitu (1) Peningkatan Pembiayaan kesehatan untuk memberikan Jaminan Kesehatan masyarakat, (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Untuk Mempercepat MDG's, (3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan (4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan.

Dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Revitalisasi puskesmas menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas beserta jaringannya dalam rangka peningkatan pelayanan terutama terkait dengan upaya menurunkan AKI dan AKB. Setiap Kabupaten/Kota diberi anggaran dalam bentuk bantuan keuangan untuk peningkatan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang diarahkan menjadi puskesmas 24 jam, hal tersebut mendorong peningkatan pelayanan di kabupaten/kota. Lemahnya sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan termasuk kerjasama lintas program antara provinsi dengan kabupaten/kota menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan.

III.2. Tujuan, sasaran, Rancangan Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 yang menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bontang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Tujuan, Sasaran, Indiaktor Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pada Rancangan Renja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Nasional/Provinsi Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2023	Target PK Tahun 2024	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	Rasio / 100.000 Kelahiran Hidup	183	172	0	0	172
			Angka Kematian Bayi	Rasio / 1.000 Kelahiran Hidup	16	10	13,48	10	10
		Meningkatkan sistem pelayanan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Angka kesembuhan TB	Persen	-	95	85	94	95
			Prevalensi HIV	Persen	-	0,16	1,21	0,16	0,16
			IR DBD	Rasio / 100.000 Penduduk	-	200	244	210	200
			Prevalensi Hipertensi	Persen	-	25	9,23	9	25
		Meningkatnya jaminan layanan Universal Coverage	Cakupan Kepesertaan JKN	Persen	-	100	102,78	100	100
		Meningkatkan kesadaran	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	7,0	6	8,03	6	6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Nasional/Provinsi Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2023	Target PK Tahun 2024	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		masyarakat terhadap PHBS, pola asuh dan pola makan	(Wasting)						
			Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)	Persen	14,0	17	16,22	17	17
			Prevalensi balita Gizi Kurus (BB Kurang/ Underweight)	Persen	-	10	15,67	11	10
		Meningkatkan kualitas SDM kesehatan	Persentase tenaga kesehatan berizin	Persen	-	100	100	100	100
			Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	FKTP	-	6	6	6	6
			Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar	RS	-	5	5	5	5
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	Orang	-	30	25	30	35
			Jumlah tenaga kesehatan yang	Orang	-	125	100	100	150

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Nasional/Provinsi Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2023	Target PK Tahun 2024	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			mendapatkan pelatihan sesuai standar						
		Menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) persatuan penduduk	Rasio	-	1:16.000	1:4.374	1:16.000	1:16.000
			Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	Persen	-	100	100	100	100
			Terbangunnya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu	Persen	-	100	100	100	100
			Ketersediaan Obat Esensial	Persen	-	100	100	100	100
			Persentase sarana produksi obat, sarana distribusi obat dan makanan yang berizin	Persen	-	100	97,08	100	100
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan	SPM RSUD	Persen	-	136(88,4%)	129 (84,8%)	129 (84,8%)	136(88,4%)
			Status Akreditasi RSUD	Status	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
			Kinerja Keuangan RSUD	Skor	-	22	21	21	22
2	Penguatan	Mengoptimalkan	Penerapan/	Persen	-	50	67	45	50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Nasional/Provinsi Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2023	Target PK Tahun 2024	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)	pelaksanaan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)						

III.3. Program Kegiatan Tahun 2021 - 2026

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi Kota Bontang yaitu **“*Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat dan Beradab*”**. Dan misi **“*Kota Bontang yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.*”**
2. Tugas dan fungsi dinas yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 39 Tahun 2018.

Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebanyak 5 program dan 23 kegiatan. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program / kegiatan sebesar **Rp. 371.184.449.651.00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*)

Tabel III.2

Tabel 13. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Bontang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan
1				Dinas Kesehatan						130.763.655.590,00					185.182.635.477,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						130.763.655.590,00					185.182.635.477,00	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						130.763.655.590,00					185.182.635.477,00	
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						94.447.385.590,00					127.436.637.977,00	
1	02	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	692.120.000,00
1	02	01	2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	7.000.000,00
1	02	01	2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	53.240.000,00
1	02	01	2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	26.620.000,00
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							79.472.673.924,00				51.208.840.000,00	
1	02	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	608 Orang/bulan	-	79.402.673.924,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	608 Orang/bulan	51.000.000.000,00
1	02	01	2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	186.340.000,00
1	02	01	2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00
1	02	01	2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.500.000,00
1	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							20.000.000,00				30.000.000,00	
1	02	01	2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000,00
1	02	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							15.000.000,00				15.000.000,00	
1	02	01	2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	15.000.000,00
1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							720.000.000,00				370.000.000,00	
1	02	01	2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.000.000,00
1	02	01	2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	250.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.715.461.903,00					7.325.946.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Paket	-	121.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	133.100.000,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	34 Paket	-	1.201.461.903,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	266.200.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	65 Paket	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65 Paket	300.000.000,00
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	45 Dokumen	-	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	14.641.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Laporan	-	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	30.000.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	70 Laporan	-	1.060.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	6.462.005.000,00
1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	120.000.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								250.000.000,00					346.410.000,00
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	146.410.000,00
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	150.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	200.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9.325.249.763,00					65.446.332.662,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.320.500,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	678.367.277,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	439.230.000,00
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	8.641.882.486,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.999.782.162,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.855.000.000,00					1.915.129.315,00
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Unit	-	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	399.300.000,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Unit	-	1.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	1.331.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target													
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Unit	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	13.310.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Unit	-	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	171.519.315,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								34.441.270.000,00			54.825.505.000,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								4.450.000.000,00			15.846.940.000,00	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	200.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	345 Unit	-	1.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	345 Unit	12.000.000.000,00
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	400 Unit	-	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	400 Unit	439.230.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	328 Paket	-	2.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	328 Paket	3.061.300.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1000 Keluarga	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluarga	146.410.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								29.490.000.000,00			38.208.950.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3400 Orang	-	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3400 Orang	133.100.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3200 Orang	-	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3200 Orang	133.100.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1200 Orang	-	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	133.100.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15000 Orang	-	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15000 Orang	133.100.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	19000 Orang	-	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19000 Orang	133.100.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	125000 Orang	-	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125000 Orang	133.100.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9000 Orang	133.100.000,00
					-		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	9000 Orang	-	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9000 Orang	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi												Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12000 Orang	133.100.000,00
					-		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12000 Orang	-	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12000 Orang	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus												Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	133.100.000,00
					-		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4000 Orang	-	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat												Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	150 Orang	133.100.000,00
					-		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	150 Orang	-	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	150 Orang	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3590 Orang	133.100.000,00
					-		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3590 Orang	-	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3590 Orang	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV												Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5351 Orang	133.100.000,00
					-		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5351 Orang	-	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5351 Orang	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)												Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	133.100.000,00
					-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana												Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	399.300.000,00
					-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	150.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	399.300.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	133.100.000,00
					-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	133.100.000,00
					-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	133.100.000,00
					-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	133.100.000,00
					-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya												Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	242.000.000,00
					-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	242.000.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	133.100.000,00
					-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	133.100.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	399.300.000,00	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	24.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	33.275.000.000,00	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	665.500.000,00	
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	5 Unit	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	17 Unit	-	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	17 Unit	199.650.000,00	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	133.100.000,00	
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	133.100.000,00	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								191.270.000,00				250.000.000,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Dokumen	-	191.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokumen	250.000.000,00	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								310.000.000,00				519.615.000,00	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Unit	-	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	4 Unit	100.000.000,00	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	6 Unit	200.000.000,00	
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	219.615.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							815.000.000,00				1.483.012.500,00		
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							15.000.000,00				36.602.500,00		
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	36.602.500,00		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							250.000.000,00				246.410.000,00		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
					-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Orang	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	100.000.000,00		
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	146.410.000,00		
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							550.000.000,00				1.200.000.000,00		
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
					-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	40 Orang	-	550.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	1.200.000.000,00		
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							460.000.000,00				652.190.000,00		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							130.000.000,00				146.410.000,00		
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	146.410.000,00		
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							130.000.000,00				271.524.000,00		
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	271.524.000,00		
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							130.000.000,00				146.410.000,00		
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air													
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	146.410.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								70.000.000,00					87.846.000,00
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan													
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-		70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	87.846.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								600.000.000,00					785.290.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100.000.000,00					139.755.000,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
					-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-		100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	139.755.000,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								200.000.000,00					279.510.000,00
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-		200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	279.510.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								300.000.000,00					366.025.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
					-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-		300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	366.025.000,00
					UPT Puskesmas Bontang Utara 1								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
					-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-		550.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.064.800.000,00
					UPT Puskesmas Bontang Utara 2								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
					-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-		550.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.064.800.000,00
					UPT Puskesmas Bontang Selatan 1								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
					-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-		550.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.064.800.000,00
					UPT Puskesmas Bontang Selatan 2								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								550.000.000,00					1.064.800.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
					-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-		550.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.064.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Bontang Barat							550.000.000,00				1.064.800.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							550.000.000,00				1.064.800.000,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							550.000.000,00				1.064.800.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							550.000.000,00				1.064.800.000,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							550.000.000,00				1.064.800.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	550.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.064.800.000,00	
					UPT Puskesmas Bontang Lestari							600.000.000,00				1.064.800.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							600.000.000,00				1.064.800.000,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							600.000.000,00				1.064.800.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							600.000.000,00				1.064.800.000,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							600.000.000,00				1.064.800.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.064.800.000,00	
					UPT Laboratorium Kesehatan							700.000.000,00				665.500.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							700.000.000,00				665.500.000,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							700.000.000,00				665.500.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							700.000.000,00				665.500.000,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							700.000.000,00				665.500.000,00		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	665.500.000,00	
TOTAL												134.813.655.590,00					192.236.935.477,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA KOTA BONTANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA						236,370,794,061,00							130.006.552.987,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						236,370,794,061,00							130.006.552.987,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						236,370,794,061,00							130.006.552.987,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	103,770,794,061,00						-	80.952.400.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.400.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Peningkata n penyelen ggaraan tata kelola pemerintah an	-	-	2.400.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1,400,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Peningkata n penyelen ggaraan tata kelola pemerintah an	-		1.400.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	500,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	500,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	97,053,394,061,00			-	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN. Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	-	73.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				471 Orang/bulan	97,038,394,061,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Akselerasi pertumbuh an sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengemba ngan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		72.191.800.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	150.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengemba ngan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		809.200.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150,000,000,00			-	2. Peningka tan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengemba ngan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	-	250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	150,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	250,000,000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	-	2.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		2.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	100,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5,600,000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	-	4.400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5,600,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengemba ngan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		4.400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	580,000,000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Peningkata n penyelen ggaraan tata kelola pemerintah an	-	-	800.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	30,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Peningkata n penyelen ggaraan tata kelola pemerintah an	-		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	200,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Peningkata n penyelen ggaraan tata kelola pemerintah an	-		400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	350,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Peningkata n penyelen ggaraan tata kelola pemerintah an	-		350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	132,400,000,000,00						-	48.654.152.987,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	400,000,000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyenggaraan tata kelola pemerintahan	-	-	654.152.987,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	400,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyenggaraan tata kelola pemerintahan	-		654.152.987,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	132,000,000,000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	-	48.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	132,000,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningka tan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengemba ngan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		48.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	150,000,000,00						-	350.000.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150,000,000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Pengemba ngan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	-	350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				20 Orang	150,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Pengemba ngan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	50,000,000,00						-	50.000.000,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Peningkata n penyelen ggaraan tata kelola pemerintah an	-	-	50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	50,000,000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Peningkata n penyelen ggaraan tata kelola pemerintah an	-		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
		JUMLAH						236,370,794,061,00							130.006.552.987,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu-isu strategis tahun 2025 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bontang diarahkan pada :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebanyak 5 program dan 23 kegiatan. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program / kegiatan sebesar **Rp. 371.184.449.651.00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*)

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bontang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan kebinamargaan yang diemban oleh Dinas Kesehatan sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kota Bontang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Kesehatan Kota Bontang. Semoga RENJA tahun 2025 Dinas Kesehatan dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang.

V.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2025 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kesehatan Kota Bontang, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Bontang.

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2025 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kepekerjtenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Kesehatan Kota Bontang, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

V.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Rencana Kerja Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Kalimantan Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota Bontang RPJMD Kota Bontang, RKPD Kota Bontang dan Renstra Dinas).

V.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan bebankerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Bontang untuk tahun 2025. Renja ini disusun berdasarkan pagu indikatif sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dalam rangka pencapaian Kinerja sesuai dengan indikator SPM dan indikator lainnya untuk lima tahun kedepan. Kesesuaian anggaran yang diusulkan dalam renja ini dengan Plafond Anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah yang diarahkan pada pembangunan kesehatan sesuai dengan target pencapaian indikator yang telah ditetapkan, namun tidak menutup kemungkinan anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena adanya keterbatasan pemerintah dalam membiayai pembangunan Kesehatan di Kota Bontang. Untuk itu tetap Kami akan memprioritaskan program/kegiatan yang memiliki daya ungkit yang besar dalam pencapaian pembangunan kesehatan.

Bontang, Juli 2024

Kepala Dinas,



Bahtiar M., S.Sos, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19670715 199001 1 001